BBPP BINUANG

CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2023. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2021 - 2024.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BBPP Binuang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yangtelah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100), (3) cukup berhasil (capaian 60-80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indicator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead Indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indicator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indicator *output*. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan *Lag Indicator.*

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meningggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Triwulan II Tahun 2023 diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja meliputi: Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2023, Analisis Nilai Kinerja Anggaran dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja beserta capain kinerja lainnya. Berikut disampaikan uraian capaian kinerja.

Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Unit Eselon I : Badan
PPSDMP Unit Eselon IIb: BBPP
Binuang Tahun Anggaran2023

(A) Meningkatnya kualitas sumderdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional
Indikator Keberhasilan : Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (IKSK)

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output),* hasil *(outcome)*, dampak *(impact)* (Permendagri No. 86/2017). Sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan adalah indikator keluaran (output) yang mencerminkan kinerja capaian dari pelaksanaan kegiatan pada BBPP Binuang.

Tabel 4. Capaian Rincian Output (RO) Pelatihan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	**Target Tahunan**		**Realisasi**	**Persen**
	2023	**Satuan**	**Triwulan II 2023**	
Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur				
- Pelatihan Fungsional Ahli - Pelatihan Bertema Budidaya - Pelatihan Bertema Nilai Tambah	180	orang	30	16,67 %
Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur				
- Pelatihan Subsistem Agribisnis/Agroindustri Hulu	1.140	orang	180	15,79 %

Indikator Kinerja	Target Tahunan		Realisasi	Persen
	2023	Satuan	Triwulan II 2023	
(Benih, Pupuk, OPT) - Pelatihan Subsistem Budidaya / Usahatani *(Smart Farming, Urban Farming)* - Pelatihan Subsistem Agribisnis/agroindustri Hilir *(Kewirausahaan, Pengolahan Hasil Pertanian)* - Pelatihan Subsistem Jasa Layanan Pendukung Agribisnis *(Operator Alsintan)*				
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	120	orang	30	25 %
Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Penumbuhan dan Penguatan P4S)	9	lembaga	8	88,89 %

Berdasarkan Tabel 4 dalam indikator kinerja pengertian aparatur merupakan perangkat alat (negara, pemerintah), para pegawai negeri. Aparatur pemerintah merupakan alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Peserta pelatihan aparatur tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK). Sepanjang Triwulan II Tahun 2023, telah dilakukan pelatihan bagi aparatur sebanyak 30 dari target 180 orang (16,67 %).

Sedangkan pelatihan non aparatur adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi profesi, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian di bidang pertanian. Peserta pelatihan non aparatur tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti petani, penyuluh swadaya, serta profesi lain di sektor pertanian yang bukan ASN). Sepanjang Triwulan II Tahun 2023, telah dilakukan pelatihan bagi non aparatur sebanyak 180 dari target 1.140 orang (15,79 %).

Dalam pelatihan tersebut digunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai bentuk penerapatan purnawidya setelah selesai pelatihan dengan

mengirimkan eveiden berupa foto kegiatan pertanian yang berkaitan penerapan materi pelatihan.

Rumus capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Nilai {(Σ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan) : (Σ Total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) x 100%)}

Persentase SDM pertanian yang menerapkan : $\frac{192 \times 100}{210} = 91{,}43\ \%$

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPP Binuang, Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan sistem aplikasi elektronik Penilaian Indikator Kinrja (e-PIK) sebesar 91,43 % dari target 80 % (Lampiran 01).

a. Jumlah pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur

Target kinerja BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2023 untuk indikator kinerja jumlah aparatur pertanian yang terlatih adalah 180 orang dengan rincian target. Untuk Triwulan II Tahun 2023 realisasi capaian indikator kinerja jumlah aparatur tahun sebesar 30 orang (16,67 %). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2023 untuk indikator jumlah aparatur pertanian yang terlatih :

Gambar 5. Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar diatas menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binuang 2023. Persentase jumlah aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 16,67

% sampai dengan akhir periode TA 2023.

b. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur

Target kinerja BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2023 untuk indikator kinerja jumlah non aparatur pertanian yang terlatih adalah 1.140 orang dengan. Terdiri dari Pelatihan Tematik Berbasis Korporasi Mendukung Food Estate Kalteng dan Pelatihan Tematik Berbasis Korporasi Mendukung Food Estate BBPP Binuang telah terealisasi sebesar 180 orang atau untuk Triwulan II Tahun 2023 sebesar 15,79 %. Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2023 untuk indikator jumlah non aparatur pertanian yang terlatih :

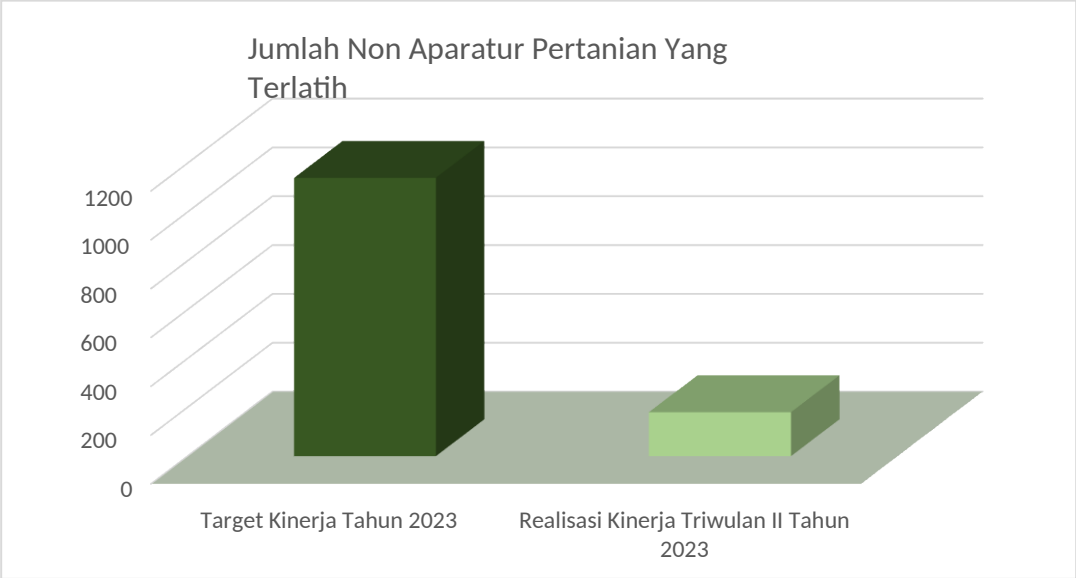

Gambar 6. Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar 6 menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2023. Persentase jumlah non aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 100 %.

c. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor pertanian yang independen, profesional dan objektif pada profesi pertanian sebanyak 120 orang, dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 masih dalam tahap perencanaan. Kegiatan sertifikasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga para lulusan pelatihan akan dapat langsung terserap dengan baik.

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

BBPP Binuang dalam mendukung program penumbuhan 2,5 juta pengusaha petani milenial terus melakukan pembinaan dan penumbuhkembangan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerjanya di Kalimantan. P4S sebagai pusat pembelajaran bagi petani harus mampu terus menerus berkreativitas untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.

Realisasi capaian indikator peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian BBPP Binuang mewakili BPPSDMP Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan Sarpras dan P4S. Sedangkan untuk bantuan kelembagaan sudah mencapai 8 lembaga (88,89 %). Ketua P4S Oibama menerima hibah berupa, 1 unit laptop, 1 unit proyektor, 1 unit layar proyektor, 1 unit kamera, 1 unit printer dan 2 unit whiteboard.

(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian
Indikator Keberhasilan : Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah

melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pelayanan.

Untuk mengetahui sejuh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamantkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPan) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Pendayaunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2019 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan, yaitu ketentuan untuk mendapatkan suatu jenis pelayanan publik yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan publik termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan, yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
4. Biaya/tarif Pelayanan, yaitu biaya atau tarif yang dikenakan.
5. Kesesuaian Produk Pelayanan, yaitu kesesuaian Produk yang dikeluarkan dengan aturan yang telah ditetapkan.

6. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian petugas dalam melayani ataupun menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan, yaitu sikap dan perilaku petugas secara ramah dan sopan serta menghormati dan menghargai masyarakat.
8. Kualitas Sarana dan Prasarana, Yaitu kondisi sarana dan prasarana yang baik dan layak digunakan.
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil survei SKM dan Nilai Rata - Rata (NRR) pada Triwulan II Tahun 2023 yang diperoleh dari 9 Indikator Unsur pelayanan, diperoleh nilai rata-rata :

1.	Persyaratan Pelayanan	:	3.98
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan	:	3.91
3.	Waktu Penyesuaian Pelayanan	:	3.94
4.	Biaya/ Tarif Pelayanan	:	3.91
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	:	3.89
6.	Kompetensi Pelaksana	:	3.94
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	:	3.93
8.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	:	3.93
9.	Sarana Dan Prasarana	:	3.98

Dari data tersebut terlihat bahwa dengan nilai SKM 98 atau 3,93 skala likert, disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan A atau kinerja unit pelayanan adalah Sangat Baik.

Selain itu berdasarkan Nilai Rata Rata/NRR Tabel 3, unsur Sarana Dan Prasarana (3,98) merupakan unsur dengan nilai tertinggi, sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan (3,91) dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (3,89). Secara keseluruahn nilai SKM 3,93 termasuk kategori A *(pelayanan sangat baik)*.

(C) Reformasi Reformasi Birokrasi BBPP Binuang Yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Layanan Pada Prima
Indikator Keberhasilan : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penlian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang dilakukan secara tahunan, sehingga untuk Triwulan II Tahun 2023 realisasi capain yang dihitung sebesar 33,5 atau sebesar 100%.

(D) Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Binuang Indikator Keberhasilan : Nilai Kinerja Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	AEA - Koordinasi Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	790.300.000	361.453.571	45,74 %
2	CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sarana Pelatihan Pertanian	86.000.000	33.300.000	38,72 %
3	PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM	396.000.000	61.424.753	15,51 %
4	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penumbuhan dan Penguatan P4S	316.557.000	283.588.365	89,59 %
5	SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan - Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur - Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	2.025.636.000	781.474.703	38,58 %
6	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	6.107.908.000	3.311.753.086	54,22 %
	Jumlah	9.722.401.000	4.832.994.478	49,71 %

Berdasarkan alokasi anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2023, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja setelah revisi adalah Rp 9.722.401.000, Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp 4.832.994.478 atau telah mencapai 49,71 %.

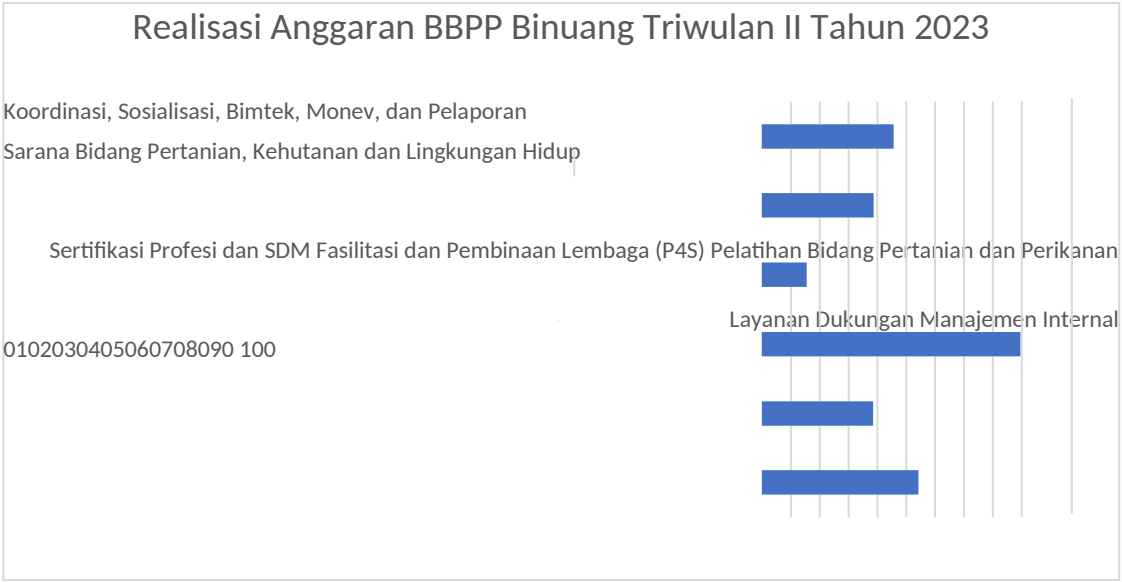

Gambar 7. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2023 (dalam persentase)

b. Analisis Nilai Kinerja Anggaran BBPP

Salah satu nilai kinerja Lembaga/Kementerian negara, termasuk UPT BBPP Binuang diukur dari bagaimana mengelola keuangan negara. Terdapat empat instrumen yang digunakan untuk mengukurnya, yaitu variabel capaian keluaran, realisasi anggaran, efisiensi, dan konsistensi rencana penarikan dana. Tiga variable merupakan variable independent, sementara satu variable, yaitu efisiensi, merupakan variable terikat, yaitu variable efisiensi. Efisiensi terikat dengan nilai realisasi anggaran dan nilai capaian keluaran. Sebagai instrument penilaian kinerja, berbagai alat ukur tersebut harus memenuhi kriteria alat ukur yang konsisten dan relevan.

Penghitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran. Nilai NKA BBPP Binuang adalah sbb :

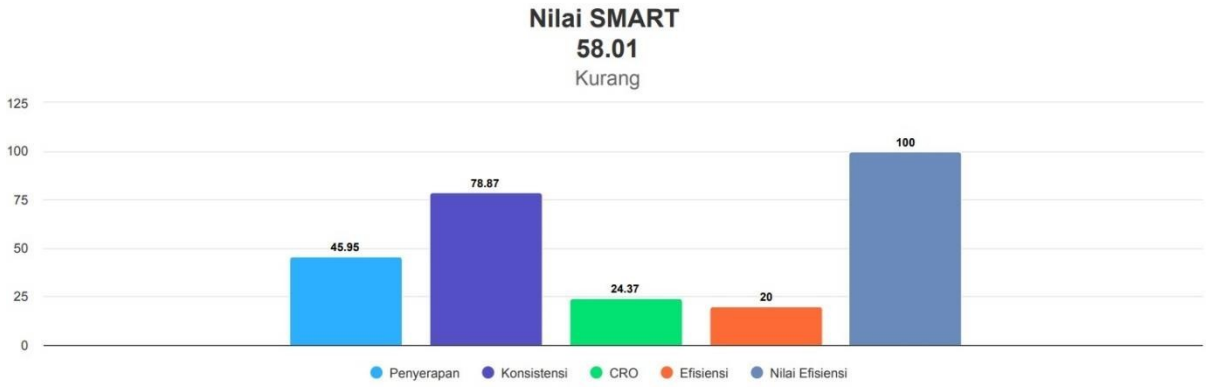

Gambar 8. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPP Triwulan II Tahun 2023

C. Capain Perjanjian Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator outcome, capaian kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, ditetapkan dengan rincian capain Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 6. Realiasai Perjanjian Kinerja BBPP Binuang TA 2020 - 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi			
			2020	2021	2022	Triwulan II 2023
(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya *(dalam Persen)*	85 %	18,46 (dari target 20 %)	82,80	91,11	91,43 %
(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian *(dalam Likert)*	3,93	3,86	3,91	3,92	3,93

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi			
			2020	2021	2022	Triwulan II 2023
(C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *(dalam Likert)*	34,00	33,5	33,5	34,95	34,00
(D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang *(dalam Likert)*	90,60	100	80,08	87,37	58,01

Berdasarkan aplikasi Smart Kemenkeu, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai keberhasilan Indikator Kinerja Outcome BBPP Binuang telah mencapai 58,01. NKA merupakan representasi dari kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Capaian NKA tersebut berarti sudah memenuhi target di atas nilai 50 pada Triwulan III Tahun 2023 dan diharapkan dapat ditingkatkan lagi hingga closing di atas 90,60 di akhir tahun. **Capaian Kinerja Lainnya**

Selain 4 (empat) indikator perjanjian kinerja tersebut, yakni (A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian, (B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, (C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, (D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang, terdapat Capaian Kinerja Lainnya sepanjang Triwulan II Tahun 2023. Capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Negara Bukan Pajak

BBPP Binuang selain menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPP juga menggunakan dana PNPB. Kegiatan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan melalui Bendahara Penerima. PNBP meliputi Penerimaan Umum dan Fungsional. Penerimaan Umum meliputi: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai/Barang/Modal TA yang lalu.

Sedangkan Pendapatan Fungsional meliputi Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi, Perkiraan Penerimaan PNBP untuk Penerimaan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan. Target penerimaan PNBP dari semula Rp 100.000.000 dan telah diperoleh sebesar Rp 81.722.500, Capaian kinerja penerimaan PNBP Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi PNBP BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rupiah)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penerimaan Fungsional					
1.	Pendapatan penjualan hasil pertanian. perkebunan. peternakan dan budidaya	22.882.500	14.940.000		
2.	Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi	31.100.000	12.800.000		
3	Perkiraan penerimaan PNBP untuk penerimaan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan	-			
Jumlah		53.982.500	27.740.000		
Jumlah Total		Rp 81.722.500			

Realisasi penerimaan PNBP Triwulan II Tahun 2023 sebesar 81,72 % atau senilai Rp 81.722.500.

2) Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kampus Merdeka

Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk

menyediakan kegiatan Kampus Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswanya.

Berikut jenis kegiatan yang tersedia di program Kampus Merdeka, yaitu:

- Magang Bersertifikat
- Studi Independen
- Kampus Mengajar
- Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)
- Pertukaran Mahasiswa Merdeka
- Membangun Desa (KKN Tematik)
- Proyek Kemanusiaan
- Riset atau Penelitian
- Wirausaha

Pengalaman mahasiswa di kegiatan Kampus Merdeka akan berpengaruh besar terhadap kesiapan karir mahasiswa dengan cara memastikan mahasiswa terus menyimak perubahan dunia luar kampus selama berkuliah dan dapat kesempatan untuk menerapkan ilmu kepada masalah di dunia nyata khususnya di sektor Pertanian.

Hal ini senada dengan Tugas & Fungsi dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Badan Penyuluhan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, yaitu mencerdaskan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian. Atas dasar itulah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al- Banjari (Uniska) menjalin kerjasama. Hal ini dilakukan dengan wujud kegiatan praktek magang di BBPP Binuang Tahun 2023, yang direncanakan akan berlangsung selama 1 Semester.

3) Finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2023

Pada Triwiulan II Tahun 2023 aplikasi inovasi Biotron (Biochar Three In One) yang dihasilkan oleh Widyaiswara BBPP Binuang Budiono, SP MM berhasil masuk Finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun

2023. Dengan berbagai kelebihan inovasi ini diharapkan dapat membantu petani dalam budidaya ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi inovasi "Biochar Three In One" (Biotron) yang dihasilkan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan, yang diharapkan dapat membantu petani mengatasi kelangkaan pupuk kimia.

"Biotron jadi bagian kita menghadirkan pupuk organik dan menjadi salah satu upaya kita meningkatkan produksi pangan tanpa ketergantungan dengan pupuk kimia. Temuan atau inovasi lain akan kita dorong, seperti 'smart farming'," kata Prof. Syahrul Yasin Limpo dilansir Antara di Jakarta, Rabu (28/06/23).

Prof. Syahrul Yasin Limpo mengakui, hadirnya Biotron menjadi salah satu pilihan dan mutlak dilakukan di tengah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan pangan pentingnya ketersediaan pangan. Apalagi pangan dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. *"Climate change, degradasi lahan dan El Nino ada depan mata kita. Dengan pendekatan scientific dan teknologi baru menjadi mutlak harus kita lakukan untuk meningkatkan produksi pangan,"* tegasnya.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2023 sudah terlaksana dengan baik namun masih mengalami hambatan/kendala yaitu :

a. Berdasarkan aplikasi Smart Kemenkeu, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai keberhasilan Indikator Kinerja Outcome BBPP Binuang telah mencapai 58,01. Pada Closing Triwulan II 2023 sudah memenuhi target di atas 50 % dan diharapkan dapat ditingkatkan lagi hingga closing di atas 90,60 di akhir tahun. Penambahan dapat dilakukan pada akun yang belum terealisasi seperti PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM (di mana target 396.000.000 dengan realiasi 61,424,753 atau sebesar 15.51 %). Sedangkan dari segi jumlah dengan target 120 peserta di mana realisasi 30 peserta (capaian 25 %).
b. BBPP Binuang siap untuk mensupport Kementerian Pertanian dalam menyongsong kegiatan pertanian sepanjang tahun 2023, lewat sejumlah rencana program dan kegiatan. Dalam hal ini Kementan telah menyiapkan dua strategi utama dalam melaksanakan hal ini. Mentan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, landasan yang digunakan Kementan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pertanian 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan tema *'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan'*. Lanjut beliau *"Pemerintah telah menetapkan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang kita kenal sebagai Prioritas Nasional (PN) yang dijabarkan menjadi beberapa Program Prioritas (PP)."*

c. BBPP Binuang terus mengadakan tema pelatihan terupdate dengan perubahan kultur, seperti *smart farming, startup* dan *climate cange* yang menjadi bukti keinginan kuat Kementan untuk memberikan kepedulian kepada insan pertanian melalui pelatihan sebagai mana arahan Bapak Mentan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong pengembangan peternakan modern berbasis teknologi presisi yang mampu memproduksi kebutuhan dalam negeri secara konsisten.

d. Sesuai arahan BPPSDMP Kementan dalam memberdayakan sektor pertanian beserta *stakeholders* milenial yang terlibat bahwa petani milenial mempunyai peran penting dalam melanjutkan pembangunan disektor pertanian. Melalui YESS, BBPP Binuang diharapkan mampu menghasilkan wirausahawan muda pedesaan serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian yang tangguh dan berkualitas di area kerja Kalimantan pada khususnya. Untuk mencapai produktivitas pertanian yang tinggi, hal utama yang paling utama yaitu tersedianya SDM Pertanian yang unggul, andal, profesional, dan mandiri serta berjiwa enterprenur tinggi.

e. Guna menggalang dukungan Instansi terkait yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelatihan berbasis program dan wilayah. dimana pesertanya dominan berasal dari wilayah Kabupaten/Kota setempat. maka optimalisasi fungsi koordinasi dan sosialisasi menjadi sangat penting perannya sebagai upaya untuk penyamaan persepsi terhadap penyiapan SDM dalam melaksanakan program pembangunan khsusnya pertanian wilayah. dan diharapkan akan mendorong dukungan yang berujung partisipasi aktif semua jajaran di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula terhadap kemungkinan adaya share biaya dalam peningkatan SDM di daerah. dapat juga menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk sense daerah untuk peduli terhadap

peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian. sehingga pada gilirannya pelaksanaan program pembangunan pertanian khususnya diwilayah Kabupaten/Kota akan menjadi gerakan bersama antara masyarakat. pemerintah dan swasta. dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan khususnya disektor pertanian.

f. Kami juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan potensi pertanian di daerah masing-masing. Dengan demikian setiap daerah mampu dan dapat membuat proyeksi kebutuhan pangan dalam jangka menengah panjang demi mengantisipasi tantangan perubahan iklim yang mengancam produksi dan rantai pasok pangan ke depan.

Lampiran 01. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya

Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya
Juni 2023
Rekap UPT - Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang 2023

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan	Presentase Peserta Menerapkan
1	Pelatihan Dasar Fungsional Bagi Penyuluh Pertanian Ahli	14 Februari - 06 Maret 2023	30	28	93.33
2	Pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis	28 Maret - 01 April 2023	30	30	100.00
3	Pelatihan Pertanian Terpadu	28 Maret - 01 April 2023	30	26	86.67
4	Pelatihan Penangkar Benih Padi	08 - 12 Mei 2023	30	27	90.00
5	Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian Bagi Penyuluh Pertanian Swadaya	15-19 Mei 2023	30	26	86.67
6	Pelatihan Pengendalian OPT Tanaman Tanaman	22 - 26 Mei 2023	30	25	83.33
7	Pelatihan Pengolahan Hasil Produk Hortikultura Bagi KWT	22 - 26 Mei 2023	30	30	100.00
Jumlah			210	192	91.43

Persentase SDM pertanian yang menerapkan : $\frac{192 \times 100}{210}$ 91.43

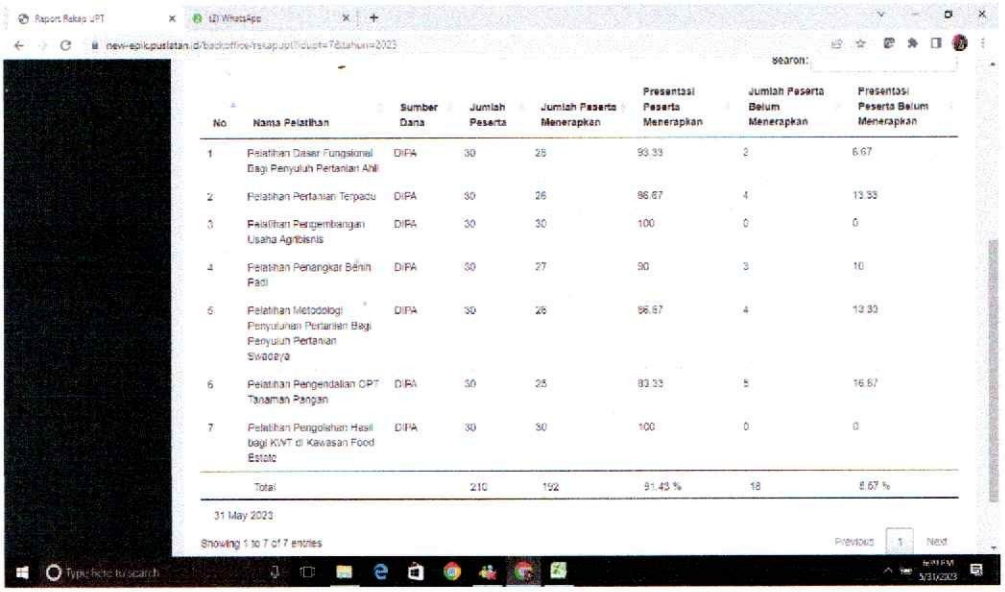

Search:

No	Nama Pelatihan	Sumber Dana	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan	Presentasi Peserta Menerapkan	Jumlah Peserta Belum Menerapkan	Presentasi Peserta Belum Menerapkan
1	Pelatihan Dasar Fungsional Bagi Penyuluh Pertanian Ahli	DIPA	30	28	93.33	2	6.67
2	Pelatihan Pertanian Terpadu	DIPA	30	26	86.67	4	13.33
3	Pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis	DIPA	30	30	100	0	0
4	Pelatihan Penangkar Benih Padi	DIPA	30	27	90	3	10
5	Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian Bagi Penyuluh Pertanian Swadaya	DIPA	30	26	86.67	4	13.33
6	Pelatihan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	DIPA	30	25	83.33	5	16.67
7	Pelatihan Pengolahan Hasil bagi KWT di Kawasan Food Estate	DIPA	30	30	100	0	0
	Total		210	192	91.43 %	18	8.67 %

31 May 2023

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous 1 Next

Lampiran 02. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BBPP Binuang - Periode Juni Tahun 2023

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
BULAN JUNI 2023

NILAI IKM
98

NAMA UNIT	:	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG					
RESPONDEN							
JUMLAH	:	222 Orang					
JENIS KELAMIN	:	L	:	171 Orang	P	:	51 Orang
PENDIDIKAN	:	SD	:	20 Orang			
		SLTP	:	40 Orang			
		SLTA	:	111 Orang			
		DI/DII/DIII	:	3 Orang			
		S1	:	46 Orang			
		S2 Keatas	:	2 Orang			

Periode Survey: 01 Jan 2023 s/d 15 Jun 2023

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

NILAI IKM UNIT PELAYANAN
A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00 *B (Baik) : 76.61 - 88.30* *C (Kurang Baik) : 65 - 76.60* *D (Tidak Baik) : 25 - 64.99*

Pengolahan Data Kuisioner IKM BBPP Binuang - Periode Juni Tahun 2023

Perhitungan	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai Per Unsur	883	867	875	868	864	875	873	873	883
Nilai Rata Rata Per Unsur	3.98	3.91	3.94	3.91	3.89	3.94	3.93	3.93	3.98
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)	0.44	0.43	0.44	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	**98**								
Mutu Pelayanan	**3.93**	**A**	**Sangat Baik**						

Keterangan :

U1 : Persyaratan
U2 : Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
U3 : Waktu Penyelesaian
U4 : Biaya/Tarif
U5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 : Kompetensi Pelaksana
U7 : Perilaku Pelaksana
U8 : Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
U9 : Sarana Dan Prasarana

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS : www.bppsdmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Haryanto
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 31 Maret 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dedi Nursyamsi	Bambang Haryanto

Unit Eselon I : Badan PPSDMP Kementan
Unit Eselon IIb : BBPP Binuang
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Outcome**	**Target**	**Keterangan**
(1)	(2)	(3)	(4)
(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85%	Persen
(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,93	Likert
(C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34,00	Nilai
(D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang	90,60	Nilai

No	**Kegiatan**	**Anggaran**
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Rp 3.814.493.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 6.107.908.000
	Jumlah	Rp 9.922.401.000

Binuang, 31 Maret 2023

Pihak Kedua

Dedi Nursyamsi

Pihak Pertama

Bambang Haryanto

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS : www.bppsdmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Haryanto
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 31 Maret 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dedi Nursyamsi	Bambang Haryanto

Unit Eselon I : Badan PPSDMP Kementan
Unit Eselon IIb : BBPP Binuang
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Outcome**	**Target**	**Keterangan**
(1)	(2)	(3)	(4)
(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85%	Persen
(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,93	Likert
(C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34,00	Nilai
(D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang	90,60	Nilai

No	**Kegiatan**	**Anggaran**
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Rp 3.814.493.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 6.107.908.000
	Jumlah	Rp 9.922.401.000

Binuang, 31 Maret 2023

Pihak Kedua

Dedi Nursyamsi

Pihak Pertama

Bambang Haryanto